



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERISAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Tunggakan Pajak Randis Rp 751,9 Juta

**KEPAHIANG** - Angka tunggakan pajak kendaraan dinas (Randis) milik Pemkab Kepahiang, ternyata cukup fantastis. Dari total 499 unit kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, diketahui tunggakan pajaknya mencapai Rp 751,9 juta. Tunggakan ini berdasarkan data yang dikeluarkan Samsat Kepahiang dari tahun 1997-2018 lalu.

Diungkapkan Kasi Penagihan Samsat Kepahiang Suparno, S.Sos, pihaknya sudah berulang kali menyurati seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang, namun hingga saat ini realisasi pembayaran pajak kendaraan dinas masih sangat rendah.

"Ya sejak kurun waktu 1997 hingga 2018, total tunggakan pajak kendaraan dinas hampir mencapai Rp 1 miliar. Kita sudah berulang kali menyurati OPD yang menunggak pajak,

namun sampai saat ini kesadaran untuk membayar pajak masih sangat minim," ungkap Suparno.

Adapun penyebab terjadinya tunggakan pajak tersebut lantaran kendaraan dinas di lingkungan Kabupaten Kepahiang ada yang tidak mempunyai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tanpa mengantongi BPKB akan menyusahkan Pemkab Kepahiang untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga setiap tahunnya tunggakan selalu membengkak.

"Hasil koordinasi kita dengan Pemkab Kepahiang, ternyata ketika akan melakukan pembayaran pajak yang disertai penggantian plat BPKD tidak ada. Tanpa BPKB pembayaran pajak serta penggantian plat tidak bisa dilakukan," kata Suparno.

Diketahui dari total 499 unit Randis terdiri dari, 397 sepeda motor dan 102 mobil. Samsat Kepahiang me-

minta kepada Pemkab Kepahiang untuk merealisasikan pembayaran pajak, apalagi informasinya seluruh anggaran untuk pembayaran pajak sudah tersedia di seluruh OPD Kepahiang.

"Tunggakan Rp 751,9 juta itu sifatnya wajib untuk dilakukan pembayaran, karena uang tersebut merupakan uang negara dan kewajiban bagi pemegang kendaraan untuk melakukan pembayaran," tambah Suparno.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM bahwa pajak kendaraan dinas merupakan tanggungjawab masing-masing OPD yang memilikinya, bukan dibebankan di anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepahiang.

"Untuk pajak kendaraan dinas OPD, itu tanggungjawab dari

OPD itu masing-masing. Bukan dibawah tanggungjawab Setdakab Kepahiang. Inilah yang selama ini menjadi miskomunikasi antara OPD dengan Setdakab," ungkap Zamzami.

Untuk itu, guna mengantisipasi kesalahpahaman seperti ini terus berlanjut, Setdakab akan melakukan pendataan terhadap seluruh kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, di OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kepahiang.

"Kita akan lakukan pendataan lagi terkait kendaraan dinas yang dipegang OPD, dan kendaraan dinas yang sudah tidak bisa beroperasi lagi. Karena kendaraan yang tidak beroperasi lagi itu kan pajaknya harus terus dibayarkan itu. OPD tidak mungkin bayar pajak lagi terhadap kendaraan yang sudah tidak beroperasi lagi," pungkas Zamzami. (sly)